

DISOKONG DAK RP45 MILIAR, DINAS PUPR MANOKWARI PASTIKAN PENINGKATAN JALAN DI SP



JawaPos.com

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, memastikan bahwa ada proyek perbaikan atau pembuatan jalan di berbagai distrik di Manokwari. Menurut Kepala Dinas PUPR Manokwari, Emba Rantelino, pekerjaan tersebut merupakan belanja wajib (mandatory spending) yang didanai oleh dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp45 miliar yang diterima tahun ini. Penugasan tersebut mencakup peningkatan jalan di daerah-daerah pemukiman di berbagai distrik di Manokwari, terutama untuk mendukung sentra produksi pangan dan transportasi pedesaan seperti di Distrik Prafi, Mokwam, Sidey, dan Masni.

Emba Rantelino menjelaskan bahwa belanja wajib adalah pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang, sehingga tidak dapat dialihkan ke program lain. Sementara itu, Dinas PUPR Manokwari bertanggung jawab untuk menciptakan infrastruktur yang handal di Kabupaten Manokwari. Salah satu program prioritas dalam DAK tersebut adalah pembangunan ruas jalan baru dari Distrik Mokwam hingga Kali Prafi dengan anggaran sebesar Rp9 miliar. Distrik Mokwam adalah pemekaran dari Distrik Warmare. Adanya anggaran sebesar Rp9 miliar tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Manokwari dapat memperpanjang pembuatan jalan baru dari Distrik Mokwam hingga Kali Prafi sepanjang tiga kilometer.

Proyek jalan baru Mokwam-Kali Prafi sebelumnya telah dimulai pada tahun 2023 dengan anggaran Rp7 miliar, dan berhasil membangun jalan sepanjang 2,4 kilometer. Rencana, ruas jalan tersebut akan mencakup total 12 kilometer untuk menghubungkan Distrik Mokwam dengan Kali Prafi sebagai jalan alternatif yang dapat menghubungkan Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), karena jalan baru tersebut tidak memiliki tanjakan ekstrem, semua jenis kendaraan dapat melaluinya.

Menurut Emba Rantelino, kebutuhan akan peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Manokwari masih tinggi. Ia berharap Dinas PUPR Kabupaten Manokwari mendapatkan dukungan anggaran tambahan, seperti dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), untuk meningkatkan jalan di ibu kota Provinsi Papua Barat.

Sumber Berita:

Harian Tribun Papua Barat, “Disokong Dak Rp45 Miliar, Dinas Pupr Manokwari Pastikan Peningkatan Jalan di SP”, tanggal 3 Maret 2024 atau melalui link https://papuabarat.tribunnews.com/2024/03/03/disokong-dak-rp-45-miliar-dinas-pupr-manokwari-pastikan-peningkatan-jalan-di-sp#google_vignette

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan:

- Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
- Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.